LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN AGAMA BIMA

TAHUN 2024

www.pa-bima.go.id
info@pa-bima.go.id
@pa-bima

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelsaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Bima Tahun 2024 ini. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini mencerminkan komitmen kami dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi publik, fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam upaya memberikan informasi yang jelas kepada seluruh pemangku kepentingan, kami merangkum capaian kinerja, keberhasilan, dan tantangan Pengadilan Agama Bima. Laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, dengan fokus pada pelaksanaan program kerja di bidang teknis yustisial dan administrasi kesekretariatan, sejalan dengan Visi-Misi Pengadilan Agama Bima.

Capaian pada 2024 tak terlepas dari kerjasama dan sinergi antara pimpinan, hakim, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Bima. Ucapan terima kasih setinggi-tingginya kami sampaikan atas dedikasi dan kerja keras semua pihak yang bersama-sama berkontribusi.

Analisis yang kami paparkan diharapkan menjadi landasan evaluasi, baik secara internal maupun eksternal, untuk membantu menentukan arah kebijakan dan program di tahun mendatang. Setiap saran konstruktif dari Anda sangat kami harapkan demi meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kami.

Terima kasih.

Bima, 13 Januari 2025
Wakil Ketua Pengadilan Agama Bima

H. IHYADDIN, S.Ag., MH

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 4

BAB II KEADAAN PERKARA 11

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA 22

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI 32

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 48

BAB VI PENGAWASAN 54

BAB VI PENUTUP 57

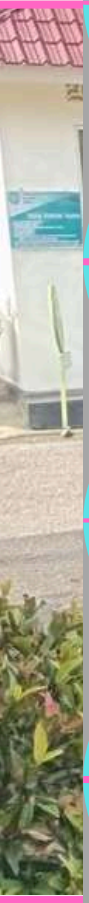

BAB I
PENDAHULUAN

Sejarah

Cikal bakal berdirinya Pengadilan Agama Bima tidak lepas dari sejarah panjang Kesultanan Bima yang terbentuk sejak tahun 1620. Sebagai kerajaan Islam, Kesultanan Bima menerapkan hukum-hukum Islam dalam penyelesaian sengketa oleh sebab itu dibentuklah Mahkamah Syar'iyyah pada 14 Agustus 1788. Mahkamah Syar'iyyah ini kemudian berubah nama menjadi Badan Hukum Syara yang tertuang dalam beslit No. 42 Tanggal 4 Mei 1947.

Selanjutnya, pengakuan dan penggabungan diri Kesultanan Bima ke dalam Negara Kesatuan Repbulik Indonesia (NKRI) memaksa dilakukannya pemisahan antara lembaga peradilan dan non peradilan yang ada dalam tubuh organisasi Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 di daerah luar Jawa dan Madura dan berubah nama menjadi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah Bima.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. B/IV/2/9/6550 tanggal 9 Desember 1964 H. Ishaq Abdul Qadir ditunjuk sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyyah Bima yang pertama.

Pada tahun 2022, berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 824/SEK/SK/VII/2022 Tanggal 04 Juli 2022 tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas, Pengadilan Agama Bima Kelas I B mendapatkan peningkatan kelas menjadi Pengadilan Agama Bima Kelas I A.

Profil Pengadilan Agama Bima

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan beragama Islam.

Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam, sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

01. Perkawinan
02. Waris
03. Wasiat
04. Hibah
05. Waqaf
06. Zakat
07. Infaq
08. Shadaqah
09. Ekonomi Syari'ah

Visi, Misi, dan Motto Pengadilan Agama Bima

Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Bima
Yang Profesional & Modern Dalam Rangka Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung

Misi

Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.

Terwujudnya Aparatur Pengadilan Agama Bima Yang Profesional, Integritas Dan Bertaqwa

Melaksanakan Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan Yang Modern, Efektif Dan Efisien;

Melaksanakan Pengawasan Dan Pembinaan Yang Berkelanjutan.

Motto

TUNTAS
Terdepan, Unggul, Totalitas dan Akuntabilitas

Tujuan Pengadilan Agama Bima

Pengadilan Agama Bima memiliki tujuan utama yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun, yang didasarkan pada pernyataan visi dan misi. Tujuan tersebut mencakup:

1. Mengupayakan agar setiap individu yang mencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi melalui proses peradilan yang adil.
2. Menetapkan tujuan untuk menciptakan peradilan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga proses hukum dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat.
3. Berfokus pada percepatan penyelesaian perkara hukum, memberikan keadilan dengan cepat dan efisien.
4. Meningkatkan kualitas putusan Pengadilan Agama Bima dengan memastikan bahwa keputusan tersebut didukung oleh pertimbangan hukum yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang berlaku.

Sasaran Strategis Pengadilan Agama Bima

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Pengadilan Agama Bima menetapkan sasaran strategis yang melibatkan beberapa aspek kunci:

1. **Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel:** Mengupayakan agar proses peradilan menjadi lebih pasti, transparan, dan akuntabel bagi semua pihak yang terlibat.
2. **Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara:** Meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara, sehingga proses hukum dapat berjalan lebih efisien.
3. **Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan:** Menyediakan akses peradilan yang lebih baik bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, memberikan kesempatan setara dalam mendapatkan keadilan.
4. **Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan:** Meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan, memastikan bahwa keputusan tersebut dihormati dan dijalankan dengan baik.
5. **Kualitas Pengawasan terhadap Kinerja Aparatur Peradilan:** Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kinerja aparat peradilan, memastikan profesionalisme dan integritas dalam pelaksanaan tugas mereka.
6. **Dukungan Sarana dan Prasarana:** Meningkatkan dukungan di bidang sarana dan prasarana, agar Pengadilan Agama Bima dapat beroperasi dengan optimal.

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, Pengadilan Agama Bima merancang program dan kegiatan pokok, termasuk program dukungan manajemen, peningkatan manajemen peradilan agama, serta peningkatan sarana dan prasarana pengadilan. Semua upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keadilan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Bima kepada masyarakat.

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bima

Pengadilan Agama Bima, sebagai pilar utama keadilan di bawah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Mataram, menempatkan dirinya sebagai garda terdepan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Terletak di wilayah yang luasnya mencakup dua pusat pemerintahan, yakni Kota Bima dan Kabupaten Bima, serta melayani masyarakat yang berada pada 23 kecamatan dan 232 desa/kelurahan.

Yuridiksi	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk
Kota Bima	**5 Kecamatan :** Rasanae Barat, Mpunda, Asakota, Raba, dan Rasanae Timur	41 Kelurahan	222,25 Km2	159.100 jiwa
Kabupaten Bima	**18 Kecamatan :** Monta, Parado, Bolo, Mada Pangga, Woha, Belo, Palibelo, Wawo, Langgudu, Lambitu, Sape, Lambu, Wera, Ambalawi, Donggo, Soromandi, Sanggar, dan Tambora.	191 Desa	4.389,40 Km2	527.952 jiwa

Sumber : Kota Bima Dalam Angka Tahun 2023 - Kabupaten Bima dalam Angka Tahun 2023

BAB II

KEADAAN PERKARA

2335

TOTAL PERKARA

PERKARA GUGATAN

1919

PERKARA PERMOHONAN

416

A. KEADAAN PERKARA

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Agama Bima pada tahun 2024 masih menyisakan perkara yang belum diselesaikan sebanyak 46 perkara terdiri dari 45 perkara gugatan dan 1 perkara permohonan. Selama tahun 2024, Pengadilan Agama Bima menerima sebanyak 2.335 perkara, yang terdiri dari 1.919 perkara gugatan dan 416 perkara permohonan, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2024 sebanyak 2381 perkara. Sedangkan perkara yang diputus pada tahun 2024 sebanyak 2.312 perkara (97,1%).

Sisa perkara Pengadilan Agama Bima sebanyak 69 perkara (2,9%) dengan rincian perkara gugatan diputus sebanyak 1876 perkara (78,79%) dan perkara permohonan diputus sebanyak 436 perkara (18,31%).

TABEL KEADAAN PERKARA TAHUN 2024

NO.	JENIS PERKARA	SISA PERKARA 2023	PERKARA DITERIMA	PERKARA DIPUTUS	SISA PERKARA
1	Izin Poligami	0	2	2	0
2	Cerai Talak	9	322	316	15
3	Cerai Gugat	24	1.513	1.503	34
4	Harta Bersama	5	16	15	6
5	Perwalian	0	12	12	0
6	Asal usul anak	0	6	6	0
7	Isbat Nikah	1	67	68	0
8	Dispensasi Kawin	0	301	301	0
9	Wali Adhol	0	2	2	0
10	Kewarisan	6	29	24	11
11	Hibah	1	2	2	1
12	Penetapan Ahli Waris	0	32	32	0
13	Lain-lain	0	31	29	2
	Jumlah	46	2.335	2.312	69

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Pada akhir tahun 2023, Pengadilan Agama Bima mencatat bahwa terdapat 1 perkara yang tersisa dalam proses banding. Selanjutnya, sepanjang tahun 2024, terdapat peningkatan signifikan di mana Pengadilan Agama Bima menerima 8 pengajuan perkara banding. Hal ini menunjukkan adanya ketertarikan dan kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa untuk mempertanyakan atau mendapatkan keputusan yang lebih rinci atau memuaskan dari tingkat peradilan yang lebih tinggi.

Rekap perkara Banding yang diterima Tahun 2024, dapat dilihat melalui Tabel dibawah ini:

NO.	NOMOR PERKARA	JENIAS PERKARA	KETUA MAJELIS	KET
1	1338/Pdt.G/2023/PA.Bm	Harta Bersama	H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.	Cabut
2	1682/Pdt.G/2023/PA.Bm	Cerai Gugat	H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.	Menguatkan
3	1687/Pdt.G/2023/PA.Bm	Kewarisan	H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.	Menguatkan
4	1731/Pdt.G/2023/PA.Bm	Kewarisan	Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.	Menguatkan
5	830/Pdt.G/2024/PA.Bm	Cerai Gugat	Abubakar, S.H.	Membatalkan
6	1116/Pdt.G/2024/PA.Bm	Cerai Gugat	Uswatun Hasanah, S.HI.	Menguatkan

C. Keadaan Perkara Kasasi

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Bima Tidak menerima perkara Kasasi

D. Keadaan Perkara Peninjauan Kembali

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Bima Tidak menerima perkara Peninjauan Kembali

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Perkara Gugatan

Selama Tahun 2024 Pengadilan Agama Bima memutus perkara Gugatan sebanyak 1.876 perkara, yang terdiri dari 316 perkara Cerai Talak, 1.503 perkara Cerai Gugat, 15 perkara Harta Bersama, 24 Perkara Kewarisan, 2 perkara Izin Poligami, 2 Perkara Wali Adhol, 2 Perkara Hibah, dan 12 Perkara Lain-lain.

Untuk Jumlah penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Bima Tahun 2024 dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

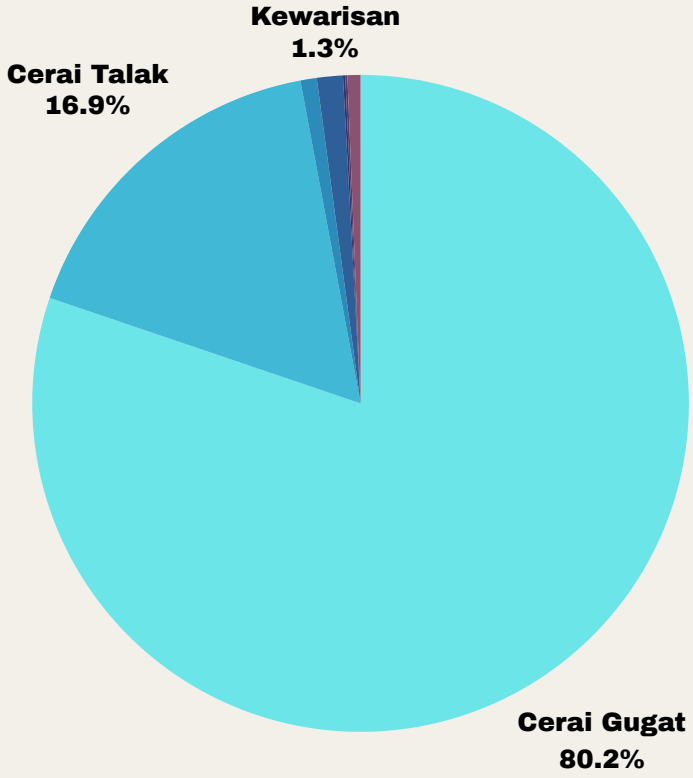

2. Perkara Permohonan

Selama Tahun 2024 Pengadilan Agama Bima memutus perkara Permohonan sebanyak 385 perkara, yang terdiri dari 289 perkara Dispensasi Kawin, 49 perkara Isbat nikah, 18 perkara Penetapan Ahli Waris, 10 Perkara Perwalian, 6 perkara Asal Usul Anak, dan 13 Perkara Lain-lain.

NO.	JENIS PERKARA	JUMLAH YANG DISELESAIKAN
1	Dispensasi Kawin	289 Perkara
2	Isbat Nikah	49 Perkara
3	Penetapan Ahli Waris	18 Perkara
4.	Perwalian	10 Perkara
5.	Asal Usul Anak	6 Perkara
6.	Lain-Lain	13 Perkara

3. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2024 adalah sebanyak 2292 perkara dari 2.312 perkara. Sehingga dari target 93% realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 99,13%.

untuk jangka waktu penyelesaian perkara tersebut sejak pendaftaran sampai dengan diputus oleh Majelis Hakim pada tahun 2024 yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan sebanyak 2292 perkara (99,13%). Sedangkan yang diselesaikan lebih dari 5 bulan sebanyak 20 perkara (0,87%)

3. Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum

Dari 2.312 perkara yang diputusa oleh Pengadilan Agama Bima Tahun 2024, 6 Perkara mengajukan upaya Hukum Banding, dan tidak ada perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.

P

1. POSBAKUM

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Bima mendapat alokasi anggaran untuk kegiatan Posbakum sebesar Rp. 96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah) untuk merealisasikan anggaran tersebut diadakan pengadaan langsung penyedia jasa sehingga terpilih penyedia jasa yaitu Lembaga Bantuan Hukum Imparsial.

Pengadilan Agama Bima memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya (gratis) melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kepada masyarakat luas pencari keadilan.

96.000.000

PAGU ANGGARAN

100% REALISASI

2. SIDANG KELILING

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Bima telah melaksanakan sidang keliling sebanyak 15 kali, yang meliputi daerah Kabupaten Bima dengan menggunakan dana DIPA sebesar Rp75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan total realisasi sebesar Rp75.000.000 atau sebesar 100% dari Pagu Anggaran.

PAGU ANGGARAN

Rp. 75.000.000,-

REALISASI ANGGARAN

100%

JUMLAH PERKARA

120 PERKARA

3. PRODEO

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Bima mendapat alokasi anggaran untuk kegiatan perkara Prodeo sebesar Rp84.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.80.700.000 (96,07%).

Adapun Pelayanan perkara prodeo di Pengadilan Agama Bima pada tahun 2024 sebanyak 208 perkara prodeo. Hal ini telah melebihi target capaian realisasi serapan jumlah perkara prodeo yang ditentukan yakni sebanyak 200 perkara, ini melebihi dari target 200 perkara sesuai dengan alokasi anggaran yang ada di DIPA Pengadilan Agama Bima.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

A. KOMPOSISI SDM BERDASARKAN GOLONGAN/RUANG

Keadaan Pegawai Pengadilan Agama Bima menurut pangkat/ golongan digambarkan pada diagram dibawah ini:

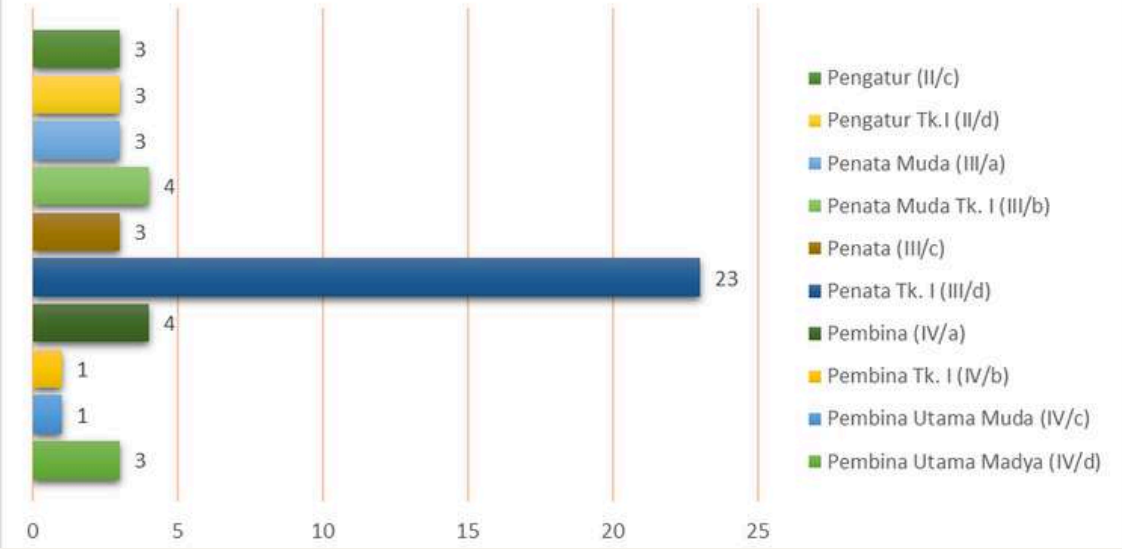

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

B. SDM BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Keadaan pegawai Pengadilan Agama Bima berdasarkan jenis kelamin digambarkan dalam diagram dibawah ini:

=

Pria

42%, 22 Orang

=

Wanita

58%, 28 Orang

C. SDM BERDASARKAN USIA

Usia s.d. 29 Tahun sebanyak 6 Orang

Usia 30 s.d. 39 Tahun sebanyak 8 Orang

Usia 40 s.d. 49 Tahun sebanyak 8 Orang

Usia 50 s.d. 59 Tahun sebanyak 2 Orang

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

D. SDM BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

Keadaan pegawai Pengadilan Agama Bima berdasarkan jenjang Pendidikan adalah sebagai berikut:

SLTA/ Sederajat	D III	D IV	S1	S2
2 Orang	4 Orang	1 Orang	32 Orang	7 Orang

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

E. SDM TEKNIS YUDISIAL

KETUA, WAKIL KETUA, HAKIM

1 Orang Ketua
1 Orang Wakil Ketua
5 Orang Hakim

Panitera, dan Panitera Muda

1 Orang Panitera
1 Orang Panitera Muda Gugatan
1 Orang Panitera Muda Permohonan
1 Orang Panitera Muda Hukum

Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti

16 Orang Panitera Pengganti
5 Orang Jurusita
3 Orang Jurusita Pengganti

F. SDM NON TEKNIS YUDISIAL

- *Sekretaris 1 (satu) orang*
- *Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 1 (satu) orang.*
- *Pejabat fungsional 2 (dua) orang (Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama dan Arsiparis Terampil)*
- *Staf Kepaniteraan 6 (enam) orang*
- *Staff Kesekretariatan 3 (tiga) orang*
- *Adapun Sumber daya manusia dari tenaga honorer pada Pengadilan Agama Bima sebanyak 11 (sebelas) orang, terdiri dari:*
  1. *Tenaga Honorer Satpam sebanyak 4 orang*
  2. *Tenaga Honorer Sopir sebanyak 3 orang*
  3. *Tenaga Honorer Cleaning Service 4 orang*

Hakim Bersertifikat Ekonomi Syariah

Drs. Muh. Mukrim, M.H.
Nomor sertifikat W24-A/PP.00.1/425/V/2015
Tahun 2015

Dra. Hj. Khafidatul Amanah,SH., M.H.
Nomor sertifikat: 16/Bld/MA-RI/PTY.Penyt.S.Ekosyar/2022
Tahun 2022

Hakim Bersertifikat Hakim Mediator

Ihyaddin, S.Ag., M.H.
Nomor sertifikat: 25/Bld/MA-RI/2013
Tahun 2013

Dra. Hj. Khafidatul Amanah,SH., M.H.
Nomor sertifikat: 11/Bld/MA-RI/2011
Tahun 2011

Solatiah, S.H.I
Nomor Sertifikat: 101/Bld/MA-RI/2013
Tahun 2013

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

G. SDM BERDASARKAN KOMPETENSI

- **KOMPETENSI PENGADAAN BARANG DAN JASA**

NO.	NAMA	NO. SERTIFIKAT	TAHUN
1	Najir, S.Ag.,	041224218894059	2012
2	Irma Mardian, SP., M.Si	01032610623	2023
3	Anny Laila Safitri, S.E, M.Si	01032460623	2023
4	Rezky Puspitarani, SE, SH	01032400623	2023

- **KOMPETENSI PPK (PNT) DAN PPSPM (SNT)**

NO.	NAMA	NO. SERTIFIKAT	TAHUN
1	Najir, S.Ag.,	PNT-00632/070/651/2023	2023
2	Anny Laila Safitri, S.E, M.Si	PNT-04443/070/815/2023	2023

- **KOMPETENSI PPSPM (SNT)**

NO.	NAMA	NO. SERTIFIKAT	TAHUN
1	Anny Laila Safitri, S.E, M.Si	SNT-04444/070/816/2023	2023

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

G. SDM BERDASARKAN KOMPETENSI

- **KOMPETENSI BENDAHARA PENGELUARAN (BNT)**

NO.	NAMA	NO. SERTIFIKAT	TAHUN
1	Anny Laila Safitri, S.E, M.Si	BNT-04569/185/184/2020	2020
2	Rezky Puspitarani, SE, SH	BNT-05518/191/099/2022	2022
3	Irma Mardian, SP., M.Si	BNT-01319/191/194/2023	2023
4	Irma Asyatun, S.E	BNT-09580/191/892/2023	2023

- **KOMPETENSI BENDAHARA PENERIMAAN (BNT)**

NO.	NAMA	NO. SERTIFIKAT	TAHUN
1	Anny Laila Safitri, S.E, M.Si	BNT-04053/185/812/2020	2020
2	Rezky Puspitarani, SE, SH	BNT-01648/191/099/2023	2023

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

B. MUTASI

1. MUTASI JABATAN KELUAR

NO.	NAMA	JABATAN	SATKER BARU
1	Husninas, S.Ag	Sekretaris	PA. Mataram
2	Nurul Mahrunisa, S.ST.,S.H	Staf	PA. Mataram
3	Arifuddin Yanto, S.Ag	Panmud Hukum	PA. Dompu
4	Annisa Fitra Puspita, A.Md	Staf	BUA

2. MUTASI JABATAN MASUK

NO.	NAMA	JABATAN	SATKER LAMA
1	Usman, S.Ag	Sekretaris	PA. Dompu
2	Ma'ruf, S.Ag, MH	Panmud Hukum	PA. Mataram
3	Kaharuddin, S.Hi	Panmud Hukum	PA. Labuan Bajo
4.	Rajabudin, S.Hi	Hakim	PA. Praya
5.	Kurniati, S.Hi	Panitera	PA. Waikabubak

3. MUTASI KENAIKAN PANGKAT

NO.	NAMA	PANGKAT SEMULA	PANGKAT BARU	TMT
1	Halimah, S.H.I	III/c	III/d	01-04-2024
2	Rezky Puspitarani, SE, S.H	III/a	III/b	01-12-2024
3	Triyono, A.Md	II/c	II/d	01-12-2024

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

3. PENSIUN

NO.	NAMA	JABATAN	TMT PENSIUN
1	Asykar, S.H	Kasubbag Kepegawaian	1 November 2024
2	Ade Buhari Muslim, S.Sy	Kasubbag PTIP	1 November 2024
3	Usman, S.Ag	Sekretaris	31 Desember 2024
4	Mustamin, BA	Panitera Pengganti	31 Desember 2024

B. DIKLAT

NO.	NAMA	JENIS DIKLAT	NAMA DIKLAT
1	Sri Atika, SE, S.H	Diklat Teknis	Hukum Wakaf dalam Putusan Pengadilan; Perlawanan Eksekusi; Titik Singgung Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dengan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); Contra Legem
2	Anny Laila Safithri, M.,Si;	Diklat Non Teknis	Bimbingan Teknis Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi
3	Rezky Puspitarani, S.E, S.H	Diklat Non Teknis	Bimbingan Teknis Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi
4	Nabillah Puspita Cahayarini, A,Md	Diklat Non Teknis	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis, Pelatihan Fungsional Arsiparis Keterampilan Angkatan IV Tahun 2024

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Secara umum pengelolaan keuangan anggaran DIPA di Pengadilan Agama Bimadilaksanakan dalam bentuk belanja yang terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang terdiri Biaya Prodeo dan Pos Bantuan Hukum

1. BELANJA PEGAWAI

PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
5.916.261.000,-	5,855,163,507,-	61,097,493,-

Realisasi Belanja Pegawai dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

URAIAN	PAGU	REALISISASI	CAPAIAN
Belanja Gaji Pokok PNS	2,797,712,000	2,784,318,580	99.52
Belanja Pembulatan Gaji PNS	40,000	31,807	83.75
Belanja Tunj Suami/Istri PNS	209,804,000	194,687,730	92.8
Belanja Tunj Anak PNS	61,896,000	55,364,450	89.45
Belanja Tunj Struktural PNS	43,200,000	37,880,000	87.69
Belanja Tunj Fungsional PNS	1,847,321,000	1,847,130,000	99.99
Belanja Tunj PPh PNS	306,702,000	303,621,140	99.00
Belanja Tunj Beras PNS	127,443,000	126,010,800	98.88
Belanja Uang Makan PNS	397,853,000	383,519,000	96.4
Belanja Tunjangan Umum PNS	25,740,000	24,050,000	93.43
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	98,550,000	98,550,000	100.00

PENGELOLAAN KEUANGAN

2. BELANJA BARANG

PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1.208.466.000	1.208.126.000	340.000

Secara keseluruhan Anggaran Belanja Barang tahun 2024 di Pengadilan Agama Bima berjumlah Rp.1,208,466,000,- (satu milyar dua ratus delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah). Realisasi pelaksanaan dari rencana penggunaan anggaran terhitung sampai dengan Desember 2024 secara keseluruhan berjumlah Rp.1,208,126,000,- (satu milyar dua ratus delapan juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).
Sisa anggaran Belanja Barang terhitung sampai dengan Desember 2024 berjumlah Rp.340,000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan persentase sebesar 99.97%.

Realisasi Belanja Barang dapat digambarkan pada tabel dibawah ini:

URAIAN	PAGU	REALISISASI	CAPAIAN
Belanja Barang	1,208,466,000,-	1,208,126,000,-	340,000,-

3. BELANJA MODAL

Belanja modal adalah belanja barang yang meliputi keseluruhan pengeluaran untuk pengadaan/ memperoleh tanah/ peralatan, mesin/ gedung, dan bangunan/ jalan, irigasi dan jaringan/ fisik lainnya meliputi biaya pembelian/ kontruksi/ perolehan dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan.
Pada tahun 2024 tidak terdapat Anggaran Belanja Modal di Pengadilan Agama Bima.

PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA

LAYANAN POSBAKUM	PEMBEBASAN BIAYA PERKARA	SIDANG DILUAR GEDUNG
96.000.000,-	84.000.000,-	75.000.000,-

Pada tahun anggaran 2024, Pengadilan Agama Bima mendapatkan anggaran peningkatan manajemen peradilan agama sebesar Rp.255,000,000,- (dua ratus lima puluh lima juta) yang terdiri dari Belanja Barang Non Operasional lainnya (prodeo), Belanja Perjalanan Biasa (Sidang di luar Gedung),dan Belanja Jasa Konsultan (Posbakum).

Realisasi anggaran biaya peningkatan manajemen peradilan agama pada Pengadilan Agama Bima terhitung sampai Desember 2024 sebesar Rp.251,700,000,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Sisa anggaran biaya peningkatan manajemen peradilan agama Pengadilan Agama Bima tahun 2024 berjumlah Rp.3,300,000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dengan persentase sebesar 98.71%.

URAIAN	PAGU	REALISISASI	CAPAIAN
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,300,000	0	0
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	15.000.000	15.000.000	100%
Belanja Jasa Konsultan	96.000.000	96.000.000	100%
Belanja Jasa Lainnya	1.500.000	1.500.000	100%
Belanja Perjalanan Biasa	134,700,000	134,700,000	100%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000	4,500,000	100%

B. PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR

1. TANAH

Pengadilan Agama Bima memiliki Sarana dan prasarana yang memadai meskipun demikian masih banyak keterbatasan karena area yang sempit beberapa sarana sesuai standar prototype belum terpenuhi dengan optimal. Gedung Pengadilan Agama Bima terletak di wilayah Pemerintahan Kota Bima di Jl. Gatot Subroto, No. 10, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima yang berada di atas tanah dengan status Hak Pakai dengan luas tanah 1.268 m², luas bangunan 950 m², dengan total nilai aset bangunan sebesar Rp3,863,963,200, selain gedung kantor, Pengadilan Agama Bima juga dilengkapi dengan sarana bangunan parkir kendaraan roda dua untuk karyawan dan tamu dan area parkir kendaraan roda empat seluas + 20 M²

2. BANGUNAN GEDUNG KANTOR

Pengadilan Agama Bima memiliki Sarana dan prasarana yang memadai meskipun demikian masih banyak keterbatasan karena area yang sempit beberapa sarana sesuai standar prototype belum terpenuhi dengan optimal. Gedung Pengadilan Agama Bima terletak di wilayah Pemerintahan Kota Bima di Jl. Gatot Subroto, No. 10, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima yang berada di atas tanah dengan status Hak Pakai dengan luas tanah 1.268 m², luas bangunan 950 m², dengan total nilai aset bangunan sebesar Rp3,863,963,200, selain gedung kantor, Pengadilan Agama Bima juga dilengkapi dengan sarana bangunan parkir kendaraan roda dua untuk karyawan dan tamu dan area parkir kendaraan roda empat seluas + 20 M²

2.1. RUANGAN KANTOR

No.	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah
1	Ruang Ketua	1
2	Ruang Wakil Ketua	1
3	Ruang Hakim	1
4	Ruang Panitera	1
5	Ruang Sekretaris	1
6	Ruang Sidang	2
7	Ruang Panitera Pengganti	2
8	Ruang Pelayanan(Ruang Panmud gugatan dan PTSP)	1
9	Ruang Kepaniteraan (Ruang Panmud Hukum dan Permohonan)	1
10	Ruang Kasubbag PTIP, Umum dan Keuangan	1
11	Ruang Kasub Kepegawaian dan Ortala	1
12	Ruang JUrusita/Jurusita Pengganti	1
13	Ruang Media Center	1
14	Ruang Kasir	0
15	Ruang Bendahara	1
16	Ruang Mediasi	1
17	Ruang Meja Informasi dan Pengaduan	1
18	Ruang Arsip Perkara	1
19	Ruang Meja Informasi	1
20	Ruang Arsip	1
21	Ruang Server	1
22	Ruang Perpustakaan	1
23	Ruang Tunggu Sidang	1
24	Ruang Tamu Terbuka	1
25	Ruang Laktasi	1
26	Smoking Area	1
27	Gudang	1
28	Toilet Pria	2
29	Toilet Wanita	1
30	Pos Satpam	1

2.2. PENGADAAN

Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Bima tahun 2024 tidak ada anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

2.3. PEMELIHARAAN

Untuk pemeliharaan Kantor Pengadilan Agama pada tahun 2024 mendapat anggaran sebesar Rp.160,295,000,- (seratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan persentase realisasi sebesar 100% :

URAIAN	PAGU	REALISISASI	CAPAIAN
Perawatan Gedung Kantor	148,295,000	148,295,000	100%
Perawatan Halaman Kantor	12,000,000	12,000,000	100%

2.4. PENGHAPUSAN

Tidak ada dilakukan Penghapusan Barang Milik Negara pada Sarana dan Prasarana Gedung Pengadilan Agama Bima Tahun Anggaran 2024.

B. PENGELOLAAN FASILITAS KANTOR

1. KENDARAAN

No.	Kendaraan Dinas	Tahun Perolehan	Kodisi			Ket
			Baik	RR	RB	
1	Mini Bus Toyota Innova	2006	x			
2	Mini Bus Toyota Avanza	2011	x			
3	Mini Bus Toyota Avanza	2011	x			
4	Honda Supra X	2005	x			
5	Honda Supra X	2008	x			
6	Honda Supra X	2008	x			
7	Honda Supra X	2008	x			
8	Honda Supra X	2008	x			
9	Honda Supra X	2009	x			
10	Honda Supra X	2009	x			
11	Honda Supra X	2009	x			
12	Honda Supra X	2009	x			
13	Honda Mega Pro	2012	x			

2. PERALATAN DAN MESIN

No.	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah
1	Lemari Kayu	17
2	Rak Besi	11
3	Rak Kayu	10
4	Filing Kabinet besi	2
5	Brandkas	1
6	Buffet	4
7	CCTV	1
8	Mesin Absensi	1
9	LCD Projector/Infocus	2
10	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1
11	Mesin Antrian	1
12	Meja Kerja Kayu	71
13	Kursi Besi/Metal	148
14	Kursi Kayu	4
15	Sice	9

No.	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah
16	Bangku Panjang Besi/Metal	8
17	Bangku Panjang Kayu	16
18	Meja Rapat	6
19	Meja Komputer	18
20	Lemari Es	1
21	AC Split	28
22	Televisi	4
23	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya)	1
24	Loudspeaker	4
25	Wireless	1
26	Unit Power Supply	8
27	Camera Video	1
28	Tiang Bendera	2
29	Water Filter	1
30	Dispenser	3
31	Palu Sidang	2
32	Lambang Instansi	1
33	Handy cam	1
34	Asbak Tinggi	8
35	Audio Mixing Portable	1
36	UPS	10
37	Microphone Cable	11
38	Video Conference	1
39	PABX	2
40	Facsimile	1
41	Genset	1
42	PC Unit	54
43	Laptop	29
44	Monitor	5
45	Printer	28
46	server	3
47	Router	1
48	Filing Cabinet Besi	1
49	Brankas	1
50	Lambang Instansi	1
51	Kursi Kayu	1
52	Rak Server	1
53	Unit Power Supply	8
54	Komputer Jaringan Lainnya	1

3. RUMAH DINAS

No.	Uraian	Jumlah	Kodisi			Ket
			Baik	RR	RB	
1	Rumah Dinas Ketua	1	x			
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	x			

4. TRANSFER MASUK

Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Bima tahun 2024 terdapat transfer masuk 1 buah Scanner (Peralatan Personal Komputer) sebesar Rp.27,480,000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

5. PEMELIHARAAN SARANA GEDUNG

Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kantor selama satu tahun anggaran 2024 berupa pemeliharaan peralatan dan mesin meliputi perawatan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2, PC, laptop, printer, AC, dan inventaris lainnya senilai Rp.183,196,000,- (Seratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Realisasi anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.183,180,000,- (seratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah), dengan persentase sebesar 99.99%

URAIAN	PAGU	REALISISASI	CAPAIAN
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	183.196.000	183.180.000,-	99.99 %

6. PENGHAPUSAN SARANA GEDUNG

Tidak ada dilakukan Penghapusan Barang Milik Negara pada Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Pengadilan Agama Bima Tahun Anggaran 2024.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. IMPLEMENTASI E COURT

e-Court adalah instrumen Pengadilan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien dan terjangkau kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2019 dan Perma No. 7 Tahun 2022, aplikasi e-Court mencakup beberapa fitur kunci dalam penanganan perkara secara online.

Aplikasi e-Court diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan layanan peradilan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penerapan e-Court memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dengan sistem peradilan tanpa harus hadir secara fisik, memberikan kemudahan dan inovasi dalam penanganan perkara.

Perkara e-court Pengadilan Agama Bima pada Tahun 2024 sejumlah 686 perkara. Rinciannya adalah 568 perkara yang diajukan oleh pengguna terdaftar dan 118 perkara oleh pengguna lain. Dari total perkara e-court yang ditangani Pengadilan Agama Bima, 28 mengadakan persidangan melalui sistem e-Litigasi.

Tabel perkara e-Court Pengadilan Agama Bima Tahun 2024:

NO.	JENIS PERKARA	SISA TAHUN 2024	MASUK TAHUN 2024	JUMLAH
1	Gugatan	27	594	621
2	Permohonan	0	65	65

Tabel perkara e-Court Pengadilan Agama Bima Tahun 2024 berdasarkan jenis pengguna:

NO.	JENIS PENGGUNA	SISA TAHUN 2024	MASUK TAHUN 2024	JUMLAH
1	Pengguna Lain	4	114	118
2	Pengguna terdaftar	23	545	568

Tabel perkara e-Court yang berhasil di putus Pengadilan Agama Bima Tahun 2024:

NO.	JENIS PERKARA	JUMLAH	PUTUS	SISA TAHUN 2024
1	Gugatan	621	571	50
2	Permohonan	65	65	0

2. IMPLEMENTASI SIPP

Pada akhir tahun 2024, Pengadilan Agama Bima berhasil melakukan update terbaru pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), mencapai versi 5.6.4. Pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam pelaksanaan administrasi perkara, mulai dari pendaftaran hingga minutasi. Implementasi SIPP di Pengadilan Agama Bima mencapai tingkat signifikan, yakni sebesar 97,1% pada akhir tahun tersebut.

Pada bulan November 2024 Pengadilan Agama Bima mengalami kerusakan server SIPP sehingga menyebabkan seluruh penyelesaian perkara melalui aplikasi SIPP mengalami kendala. Saat ini Pengadilan Agama Bima menjalankan aplikasi SIPP menggunakan Personal Computer biasa, yang difungsikan sebagai server sementara SIPP.

2. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

a. JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Mahkamah Agung adalah wadah yang bertujuan untuk pendayagunaan bersama dokumen hukum dan kebijakan di lingkungan tersebut. Website JDIH satker Pengadilan Agama Bima, www.jdih.pa-bima.go.id, telah diluncurkan pada bulan Oktober 2022 dan sudah dapat diakses oleh publik.

Dengan adanya JDIH dan website Pengadilan Agama Bima, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dokumen-dokumen hukum yang terkait dengan pelayanan peradilan. Ini menciptakan transparansi, aksesibilitas, dan akuntabilitas dalam informasi hukum di lingkungan peradilan.

b. Media Sosial

Pengadilan Agama Bima, kekuatan media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana alternatif penyebaran informasi hukum, kebijakan, dan layanan peradilan. Dengan memanfaatkan media sosial, Pengadilan Agama Bima dapat lebih mudah dan cepat menjangkau masyarakat, memberikan informasi terkini, serta meningkatkan tingkat kesadaran hukum di kalangan publik. Selain itu, keberadaan media sosial juga dapat memberikan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, menciptakan keterlibatan yang lebih aktif dalam hal-hal terkait dengan peradilan.

Instagram
@pa-bima
988 Pengikut

FACEBOOK
@pabimatuntas
1.217 Pengikut

YouTube
@mediapabima
87 Pengikut

c. Hardware Penunjang Teknologi Informasi

No.	Jenis Barang	Jumlah	Ket
1	Local Area Network (LAN)	1	
2	Pc unit	54	
3	Laptop	27	
4	Scanner	2	
5	UPS	18	
6	Server	3	
7	Router	1	
8	Hub	1	
9	Modem	2	
10	Wireless Access Point	5	

d. Software

Perangkat lunak yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Bima mencakup aplikasi-aplikasi baik yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, maupun yang dikembangkan oleh pihak ketiga. Beberapa aplikasi tersebut antara lain:

No.	Jenis Aplikasi	Status
1	Aplikasi SIPP	Aktif
2	Aplikasi Siman	Aktif
3	Aplikasi Simpeg	Aktif
4	Aplikasi SIKEP MA-RI	Aktif
5	Aplikasi SAKTI Kemenkeu	Aktif
6	Aplikasi Gaji Web	Aktif
7	Aplikasi e-Court	Aktif
8	Aplikasi SIAP Surat	Aktif
9	Aplikasi Antrian PTSP	Aktif
10	Aplikasi e-Tamu	Aktif
11	Aplikasi Antrian sidang	Aktif
12	Aplikasi komdanas	Aktif
13	Aplikasi SMS notif	Aktif
14	Aplikasi ABS-SIPP	Aktif
15	Aplikasi SIWAS	Aktif
16	Aplikasi SIMARI	Aktif
17	Aplikasi OMSPAN	Aktif
18	Aplikasi SIRUP LPSE	Aktif
19	Web Monsakti	Aktif

BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Zona Integritas (ZI) merupakan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Tahapan yang paling penting dalam Zona Integritas adalah pembangunan itu sendiri. Pembangunan berarti membangun integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, massif, komprehensif, dan sistematis. Membangun integritas berarti membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya.

Membangun sistem berarti membangun berbagai instrumen, SOP, dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi/perbuatan tercela lainnya. Sebagai contoh, membangun sistem pengendalian gratifikasi, membangun Whistleblowing System (WISE), membangun sistem pengendalian intern, dan lainnya.

Membangun manusia berarti membangun mindset aparatur pemerintah untuk enggan, malu, dan merasa bersalah melakukan tindak pidana korupsi/tindakan tercela lainnya. Proses membangun mindset tidaklah mudah, karena akan ditemukan keengganan bahkan penolakan. Selain itu pula diperlukan waktu yang tidak singkat dengan pembiasaan yang terus menerus.

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan Zona Integritas menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Pengadilan Agama Bima sudah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas sejak tahun 2019, dan di Tahun 2024 ini Pengadilan Agama Bima masih terus melaksanakan Pembangunan Zona Integritas tersebut.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas.

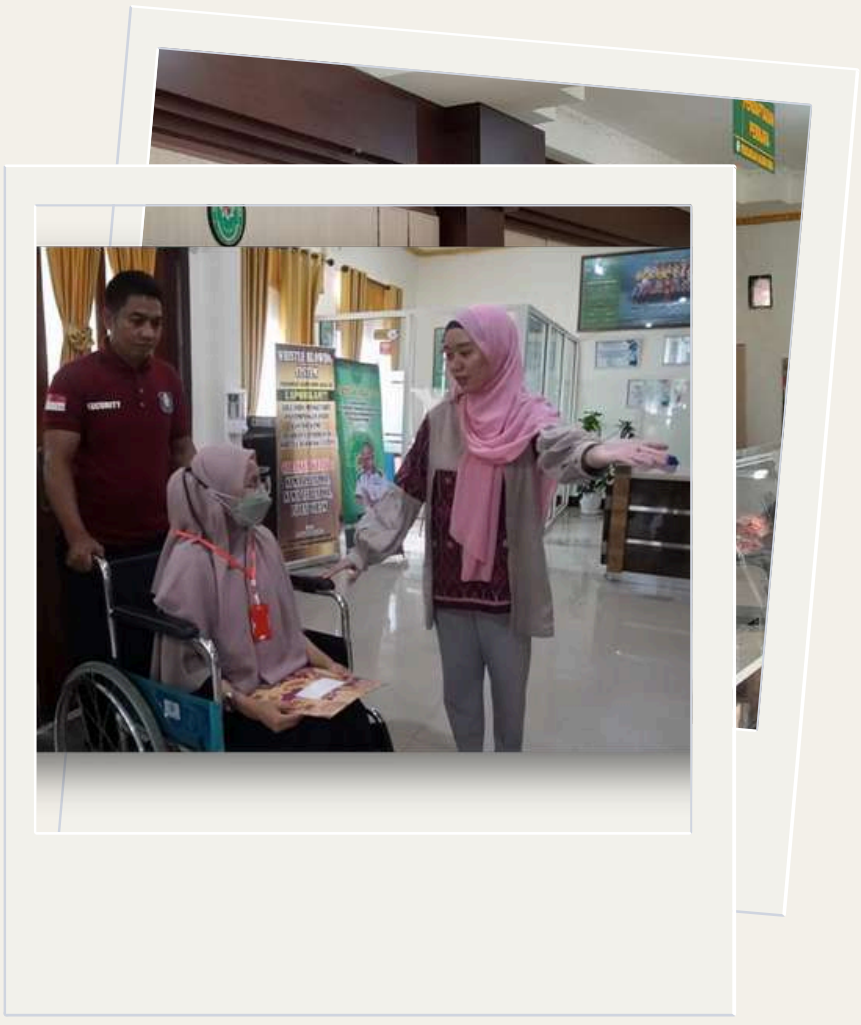

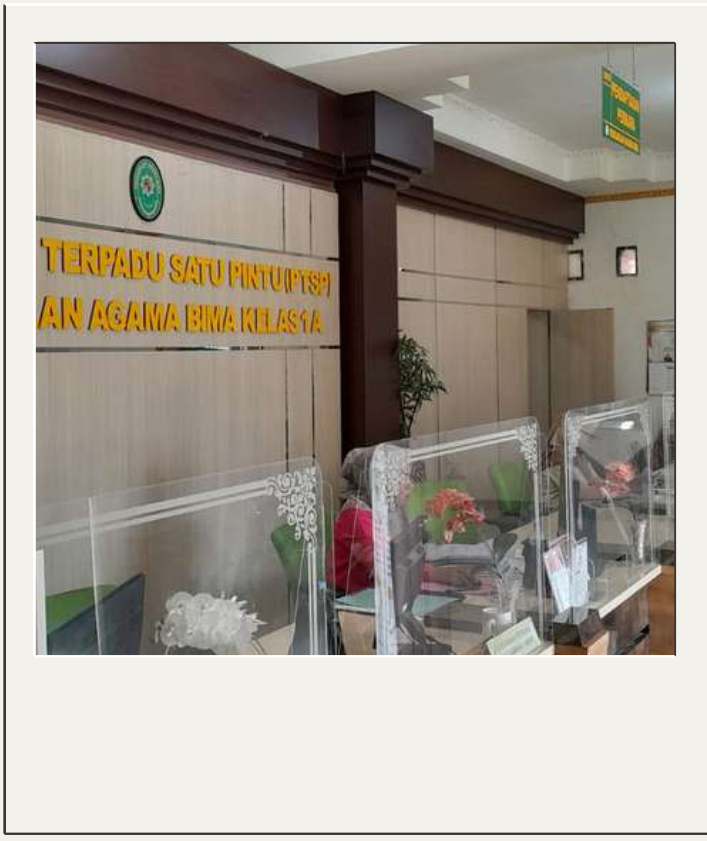

Layanan PTSP di Pengadilan Agama Bima mencakup:

- Meja Permohonan Informasi dan pengaduan yakni meja yang melayani permohonan informasi dan pengaduan dimana petugasnya memiliki kompetensi di bidang informasi peradilan sehingga mampu memberikan informasi yang jelas kepada para pencari keadilan
- Meja Pelayanan Pendaftaran Perkara yakni tempat pendaftaran perkara permohonan/gugatan, upaya hukum, serta permohonan ekseskusi
- Meja Kasir: memberikan layanan penaksiran panjar biaya perkara, pemberiam SKUM, pembayaran PNBP, pengembalian sisa panjar dan penyerahan bukti- bukti pembayaran
- Meja Produk Pengadilan yakni meja yang melayani pengambilan produk pengadilan oleh petugas produk pengadilan
- Pojok E-Court melayani masyarakat yang ingin mengajukan perkaranya melalui aplikasi e-Court
- Meja Gugatan Mandiri melayani masyarakat yang ingin membuat gugatan secara mandiri
- Loket Prioritas melayani kelompok rentan dengan fasilitas kursi roda, buku braile dan alat bantu disabilitas

PTSP Pengadilan Agama Bima telah menyediakan loket prioritas untuk melayani kelompok rentan dan disabilitas dimana kelompok tersebut akan dilayani secara prioritas dimulai saat kedatangan kemudian diberikan kartu/ID khusus untuk diantarkan ke loket khusus. Di loket khusus disediakan buku braile, kursi roda, maupun alat bantu disabilitas serta petugas yang akan membantu para pencari keadilan agar lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan keadilan.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Masalah yang dihadapi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima adalah efisiensi dan aksesibilitas dalam pelayanan hukum. Pertama, luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima yakni terdiri dari 2 wilayah pemerintahan daerah yaitu Kabupaten Bima dengan 18 kecamatan dan Kota Bima dengan 5 kecamatan, mengakibatkan para pihak yang ingin mendapatkan kepastian hukum harus mengeluarkan biaya lebih tinggi dalam mengurus perkara mereka. LAMPA BIMA merupakan program unggulan Pengadilan Agama Bima yang tujuannya mengimplementasikan Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Lampa diadopsi dari Bahasa Daerah Bima yang arti Berjalan atau Jalan. LAMPA BIMA adalah layanan mobile Pengadilan Agama Bima yang menggabungkan Layanan PTSP dan sidang di luar Gedung dengan memanfaatkan teknologi dalam pelayanan hukum untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Mengimplementasikan sistem pendaftaran online, persidangan elektronik, dan platform digital untuk memudahkan para pihak dalam mengurus perkara mereka.

BAB VI
PENGAWASAN

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan di Pengadilan Agama Bima diarahkan pada pemastian bahwa semua tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Ini adalah fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan pelaksanaan tugas agar berjalan dengan baik. Pengawasan ini dilakukan dengan dua jenis, yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Rutin/Reguler.

Pengawasan Melekat melibatkan pembentukan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) dengan tugas-tugas spesifik sesuai bidang masing-masing. **Koordinator Hakim Pengawas Bidang, Ihyaddin, S.Ag., MH,** memastikan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan pengawasan. Adapun Hakim Pengawas Bidang melibatkan **Abubakar, SH** (Manajemen Peradilan), **Uswatun Hasanah, S.Hi** (Administrasi Perkara), **Solatiah, S.Hi** (Kesekretariatan), dan **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, SH., MH** (Manajemen Kinerja Pelayanan Publik).

B. EVALUASI

Pengadilan Agama Bima selalu berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan evaluasi secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Evaluasi dilakukan pada dua bidang utama, yaitu Bidang Kepaniteraan (Administrasi Peradilan) dan Bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum). Berikut adalah rangkuman evaluasi untuk kedua bidang tersebut:

1. Bidang Kepaniteraan (Administrasi Peradilan):
    - Dilakukan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui rapat-rapat periodik dengan hakim, panitera pengganti, jurusita/juru sita pengganti, dan petugas kepaniteraan.
    - Rapat koordinasi diadakan secara rutin dengan seluruh karyawan/karyawati setidaknya satu kali dalam sebulan.
    - Pengawasan dan pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
    - Pengawasan rutin dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilaksanakan setiap tahun.
2. Bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum):
    - Langkah-langkah evaluasi termasuk rapat-rapat dengan kasubbag, petugas pengelola keuangan, rapat dengan petugas kebersihan, dan satpam sesuai dengan kebutuhan.
    - Rapat koordinasi rutin dengan karyawan/karyawati Pengadilan Agama Bima minimal satu bulan sekali.
    - Pengawasan dan pembinaan dari hakim pengawas bidang dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram.
    - Pengawasan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung RI setiap tahun.
    - Evaluasi program kerja dilakukan pada setiap tahun.

Melalui langkah-langkah evaluasi ini, Pengadilan Agama Bima bertujuan untuk terus meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan kepada masyarakat pencari keadilan.

BAB VII
PENUTUP

A. KESIMPULAN

- Penyelesaian perkara tahun 2024 pada tingkat pertama telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, sisa perkara dari tahun 2023 sebanyak 46 perkara, ditambah yang diterima pada tahun 2024 sebanyak 2.335 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2024 sebanyak 2.381 perkara dan telah berhasil diselesaikan sebanyak 2.312 perkara (97,1%), sisanya sebanyak 69 perkara (2,9%).
- Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara, telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada kesalahan-kesalahan kecil yang perlu diperbaiki/disempurnakan.
- SIPP sebagai aplikasi yang menggunakan Teknologi Informasi yang digunakan untuk administrasi penanganan perkara, penyediaan informasi publik, pencatatan kinerja dan pelaporan telah diimplementasikan di Pengadilan Agama Bima dengan menggunakan versi 5.6.4 (update terbaru). Diakhir tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 mencapai angka 97,1 %.
- Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yustisial, tingkah laku dan perbuatan hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif.
- Penatausahaan bagian kepegawaian telah memakai SIMPEG, SIKEP SIMARI, bagian keuangan memakai sistem aplikasi Keuangan (SAKTI) telah dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan pedoman pelaksanaan walaupun dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan.
- Jumlah pegawai menurut jenis pekerjaan dan fungsinya belum seimbang dengan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan.
- Secara kumulatif, nilai capaian akhir Kebijakan Pengadilan Agama Bima tahun 2024 berhasil dengan baik.
- Pengelolaan Mutasi dan Gaji Berkala berdasarkan tanggal SK dan periode telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- Komposisi tenaga teknis yudisial dengan non teknis yudisial belum sesuai karena banyak tenaga non yudisial yang diangkat menjadi tenaga yudisial.

B. REKOMENDASI

- SDM non teknis diharapkan ada penambahan pegawai non sarjana hukum untuk ditempatkan di bidang administrasi umum / kesekretariatan terutama SDM yang mempunyai kualifikasi di bidang Teknologi Informasi (pranata komputer).
- Diharapkan adanya peningkatan anggaran rutin dan belanja modal khususnya Peralatan Kerja (Server, Laptop, PC. Unit, Scanner, Printer, Penambahan Jumlah CCTV, dan perangkat Teknologi Informasi untuk mendukung penyelesaian tugas sesuai bidangnya masing-masing. dan belanja modal perluasan gedung untuk ruang arsip, ruang kerja dan perpustakaan beserta barang inventaris lainnya agar barang-barang yang usang/sudah tidak layak, bisa diganti yang lebih layak
- Pembinaan dan pelatihan kepada hakim dan seluruh pegawai perlu terus-menerus ditingkatkan guna mewujudkan aparat hakim dan pegawai yang profesional (berwawasan luas, terampil menjalankan bidang tugasnya dan berakhlaq mulia).
- Selanjutnya kepada seluruh Pejabat Fungsional dan Struktural di lingkungan Pengadilan Agama Bima, disarankan lebih meningkatkan disiplin, integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing, serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan moralitas.